

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2021

ISSN	: 2645-9670
No. Publikasi	: 82000.2225
Katalog BPS	: 3205005.82
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: viii + 51 Halaman
Naskah	: BPS Provinsi Maluku Utara
Penyunting	: BPS Provinsi Maluku Utara
Desain Sampul	: BPS Provinsi Maluku Utara
Diterbitkan Oleh	: ©BPS Provinsi Maluku
Tahun	Utara : 2022

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2021

Penanggung Jawab Umum :

Aidil Adha SE, ME

Penanggung Jawab Teknis :

Insaf Santosio SST, M.Si

Penyunting :

Dwi Cahyadi, SST

Penulis :

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

Pengolah Data :

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

Desain :

Yudia Pratidina Hasibuan, SST

KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terpercaya.

Publikasi “Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2021” menyajikan data dan informasi kemiskinan yang mencakup metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan analisis perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin di Maluku Utara. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021.

Diharapkan publikasi ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus. Saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Ternate, 22 Agustus 2022
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA


Aidil Adha, SE, ME

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Ruang Lingkup	4
1.3. Data yang Digunakan	4
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	5
2.1 Definisi Kemiskinan	5
BAB III METODOLOGI	11
3.1. Penghitungan Kemiskinan	13
3.2. Indikator Kemiskinan	18
BAB IV ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA	21
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara	23
4.2. Jumlah Penduduk Miskin.....	25
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	27
4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	29
BAB V KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI MALUKU UTARA	33
5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)	36
5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan	38
5.3. Karakteristik Pendidikan	40
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel L.1.	Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019 – 2021	45
Tabel L.2.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019– 2021	46
Tabel L.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015 – 2021	47
Tabel L.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019 – 2021	48
Tabel L.5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2019 – 2021	49
Tabel L.5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019– 2021	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2016-2021 (Ribu Rupiah).....	23
Gambar 4.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021 (Rupiah).....	24
Gambar 4.3.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Tahun 2019-2021	25
Gambar 4.4.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019-2021	26
Gambar 4.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2016-2021	27
Gambar 4.6.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021.....	28
Gambar 4.7.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2016-2021	39
Gambar 4.8.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021.....	30
Gambar 5.1.	Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara Tahun 2021	36
Gambar 5.2.	Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2021	37
Gambar 5.3.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Maluku Utara Tahun 2021	38
Gambar 5.4.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Maluku Utara Tahun 2021	39

Gambar 5.5.	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Miskin di Maluku Utara Tahun 2021	40
Gambar 5.6.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara Tahun 2019-2021....	41

<https://malut.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun.

BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi melalui Susenas Modul Konsumsi setiap bulan Maret.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 yang terdiri dari 5570 rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara



<https://malut.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin secara periodik setiap tiga tahun sejak tahun 1984, dan penyajiannya sampai level provinsi baru dimulai tahun 1990. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Selanjutnya mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember), BPS mulai menyajikan data kemiskinan untuk level kabupaten/kota meskipun untuk karakteristik rumah tangga miskin hanya dapat disajikan pada tingkat provinsi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2021. Analisis ini juga menyajikan karakteristik rumah tangga miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk, serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

1.3. Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 yang terdiri dari 5570 rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Data tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan menurut kabupaten/kota serta analisis karakteristik rumah tangga miskin untuk tingkat provinsi.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR



Kemiskinan Relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan



Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan



Kemiskinan Absolut

Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.



Kemiskinan Kultural

Diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskina



BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Kemiskinan

2.1.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Tatkala negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.1.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu decade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu daerah dengan daerah lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua daerah tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US \$ 1 PPP per kapita per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar

penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 PPP per kapita per hari, di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US\$ yang digunakan adalah US\$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan, tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Misalnya penduduk yang tinggal di pulau-pulau terluar atau mendekati pulau terluar.

BAB 3

METODOLOGI

Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index) = P0

yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)

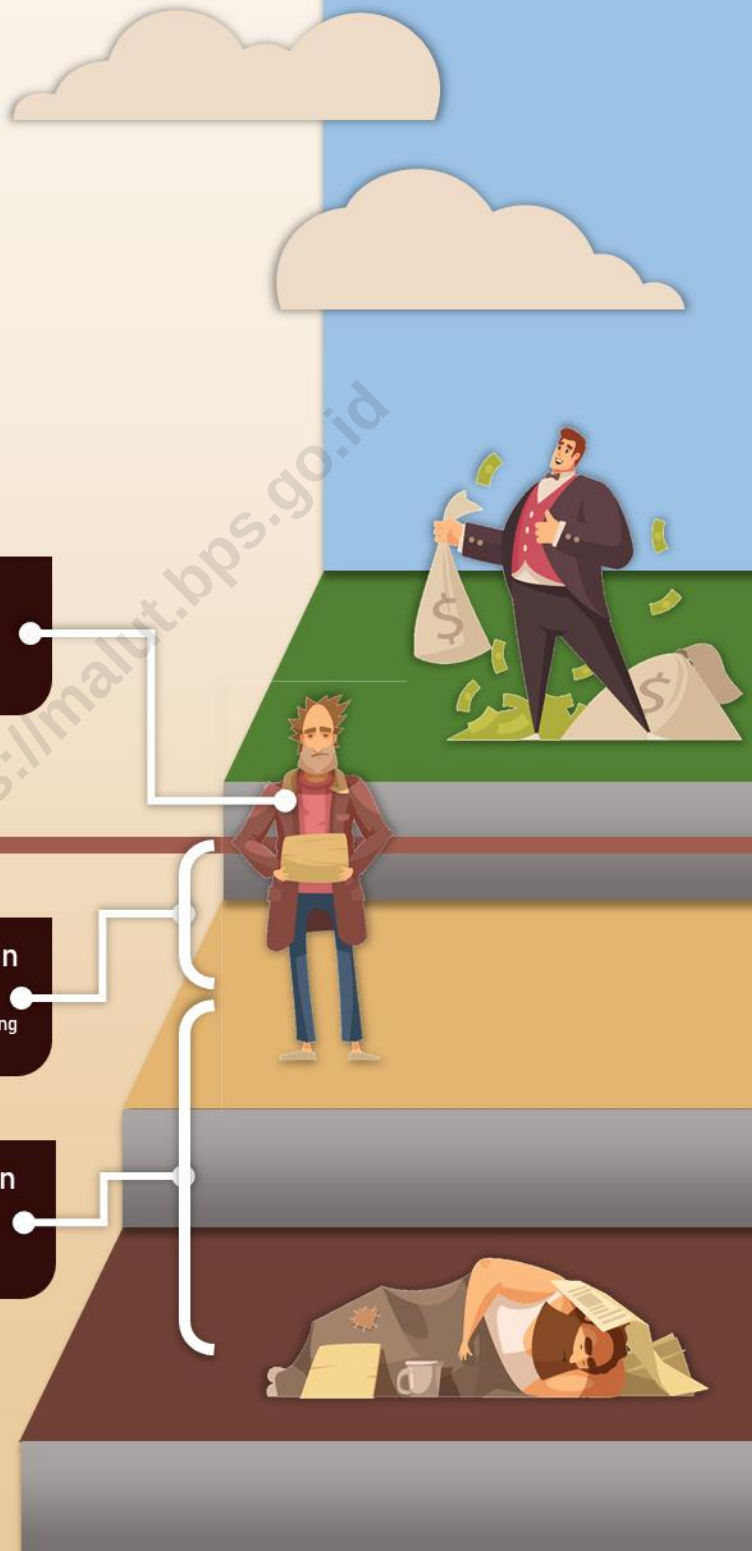
GARIS KEMISKINAN

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index) = P1

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index) = P2

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin



BAB III

METODOLOGI

3.1. Penghitungan Kemiskinan

3.1.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2020 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021.

3.1.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: $GK = GKM + GKNM$.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

3.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{kk=1}^{52} PP_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{kk=1}^{52} VV_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} Q_{jkp}}$$

di mana:

K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan

dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

$\%PM_k$ = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.

PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.

P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

PM_p = Penduduk miskin provinsi.

PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana:

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.

PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.

P_p = Jumlah penduduk provinsi.

3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* ($HCI = P_0$), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

di mana:

$$\alpha = 0, 1, 2$$

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1), jika $\alpha=2$

disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2).

- z = Garis kemiskinan
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

<https://malut.bps.go.id>

BAB 4

ULASAN

KEMISKINAN MALUKU UTARA



Penduduk Miskin
87,16 Ribu orang
(6,89 persen)



Garis Kemiskinan
Rp 489.375



PEDESAAN



PERKOTAAN



PERKOTAAN + PEDESAAN

Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)

0,970

0,969

0,970

Indeks keparahan Kemiskinan (P2)

0,191

0,247

0,207

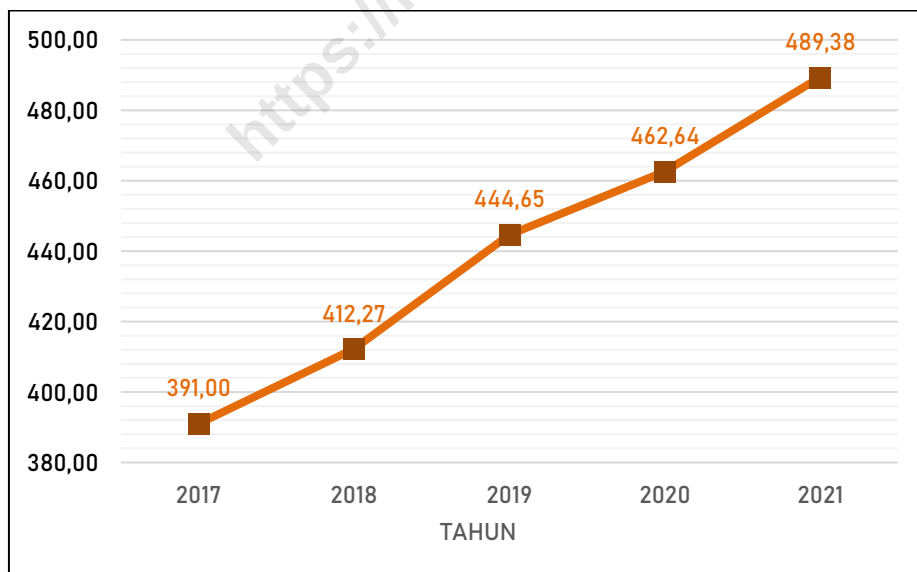
BAB IV

ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA

4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

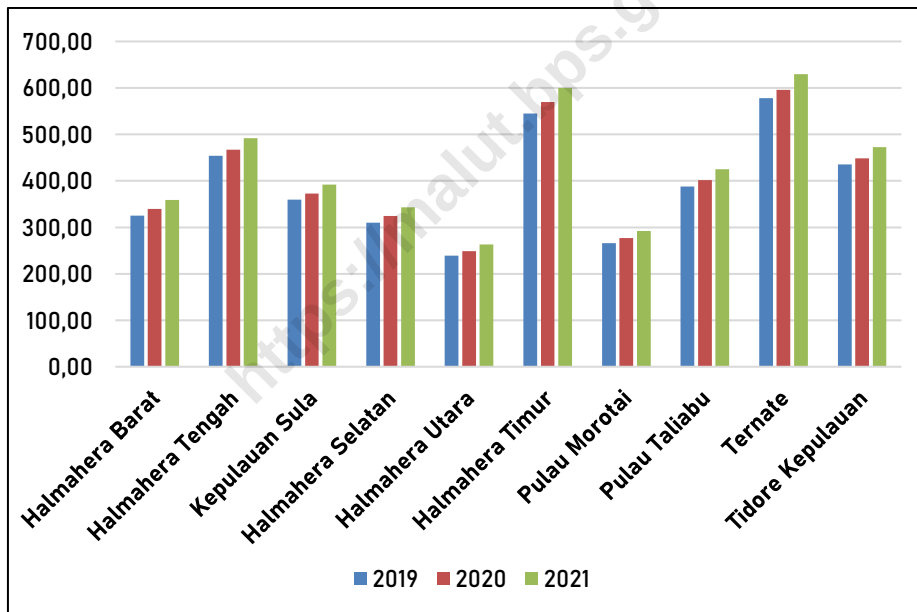
Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, tersaji pada Gambar 4.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

**Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara
Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)**



Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021 sebesar Rp.489.375 naik sebesar Rp.26.736 atau 5,78 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.462.639. Kenaikan garis kemiskinan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kenaikan garis kemiskinan pada tahun 2020 lalu sebesar 4,05 persen.

Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)



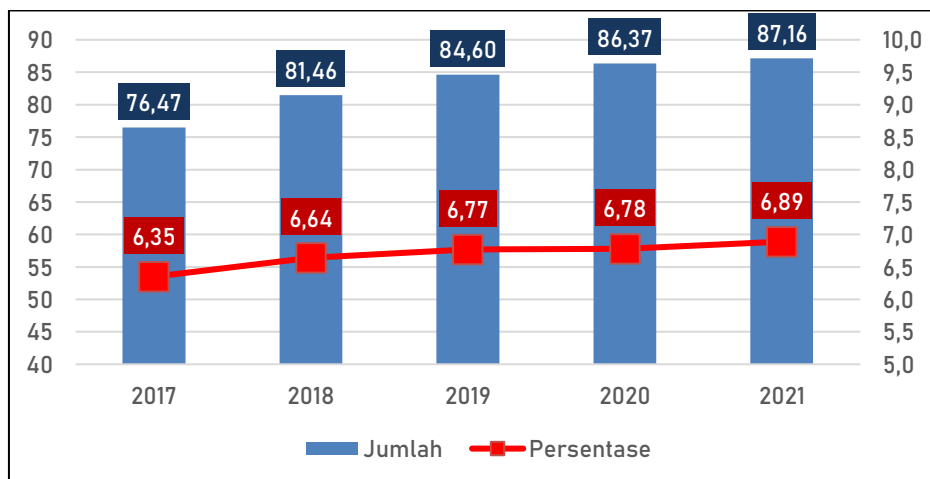
Seperti terlihat dalam Gambar 4.2, Garis kemiskinan Kota Ternate pada tahun 2021 adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 629.463. Angka tersebut sekaligus menggeser Halmahera Timur dari posisi tertinggi yang mana garis kemiskinan Halmahera Timur pada tahun 2021 sebesar Rp.600.339. Sementara itu Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2021 memiliki garis kemiskinan

terendah yaitu sebesar Rp.263.507. Perbedaan garis kemiskinan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga komoditi dalam penghitungan garis kemiskinan di masing- masing kabupaten/kota, baik komoditi makanan maupun non makanan. Perkembangan garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tersaji dalam Tabel L.1.

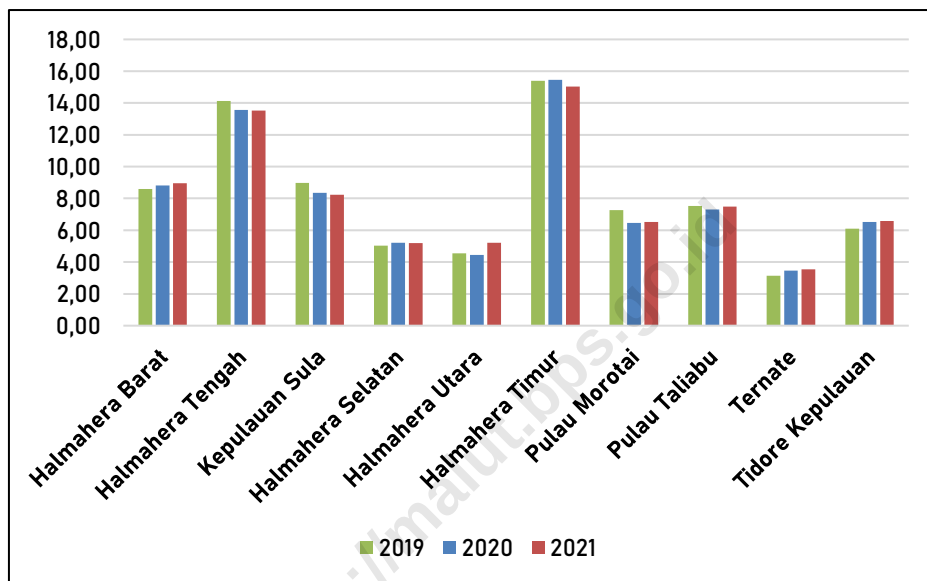
4.2. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan penduduk miskin Maluku Utara berdasarkan data Susenas dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah maupun persentase. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin masih sekitar 76,47 ribu orang atau sebesar 6,35 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yaitu menjadi 87,16 ribu orang atau sebesar 6,89 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara.

Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah (Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Tahun 2017-2021



**Gambar 4.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021**

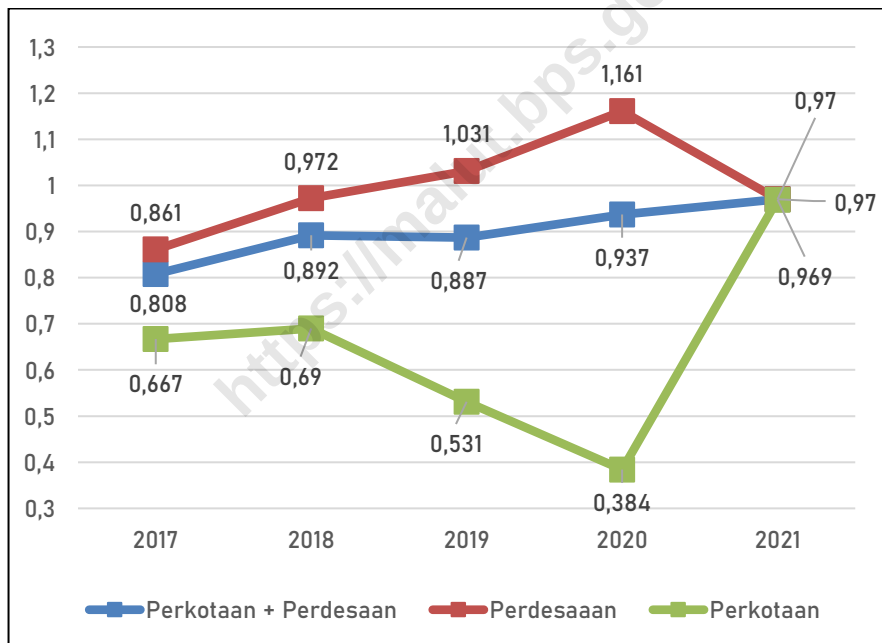


Seperti pada Gambar 4.4, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami kenaikan sementara beberapa kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 15,05 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 13,52 persen. Sementara itu Kota Ternate memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 3,55 persen pada tahun 2021. Kemudian tingkat kemiskinan terendah berikutnya yaitu Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 5,19 persen dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 5,22 persen. (Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.2).

4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Gambar 4.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2017-2021

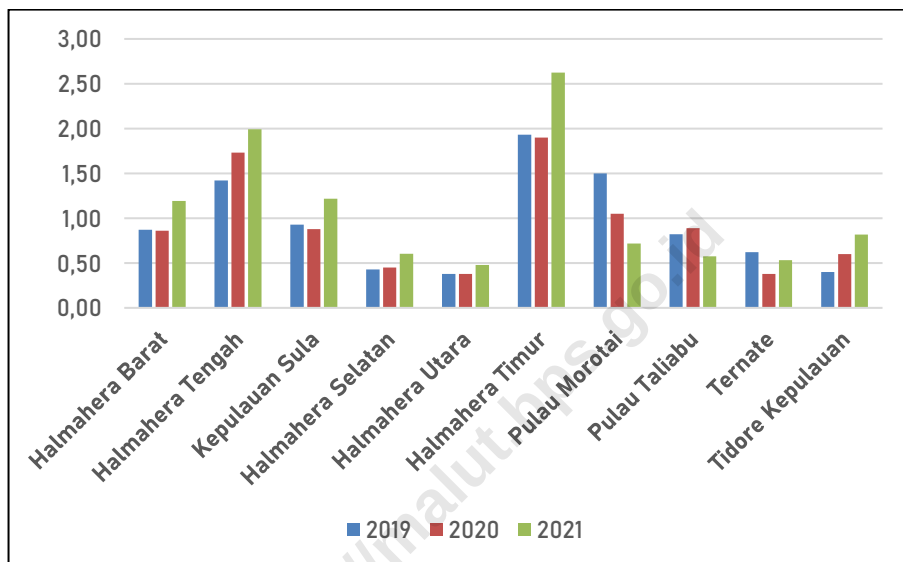


Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir bergerak fluktuatif. Pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara meningkat menjadi 0,970 dibanding tahun 2020 yang sebesar 0,937. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Maluku Utara semakin menjauhi garis kemiskinan.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan, indeks kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan lebih dalam dibanding di daerah perkotaan. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.3).

Sementara itu pada Gambar 4.6. dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2021, kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 2,624 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu sebesar 0,477. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikit lebih sulit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur daripada di Kabupaten Halmahera Utara karena secara umum penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur memiliki jarak yang cukup jauh di bawah garis kemiskinan. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.4).

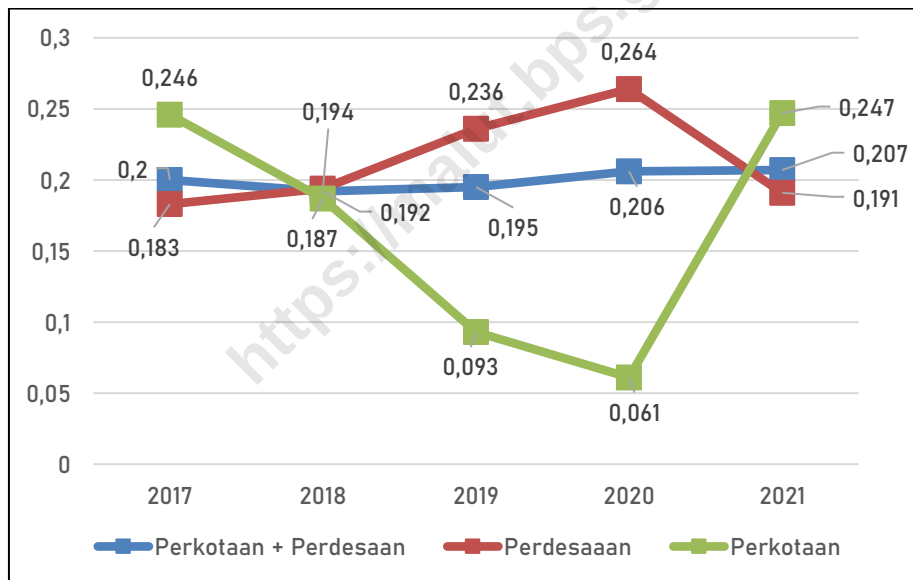
**Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021**



4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 4.7. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2017-2021

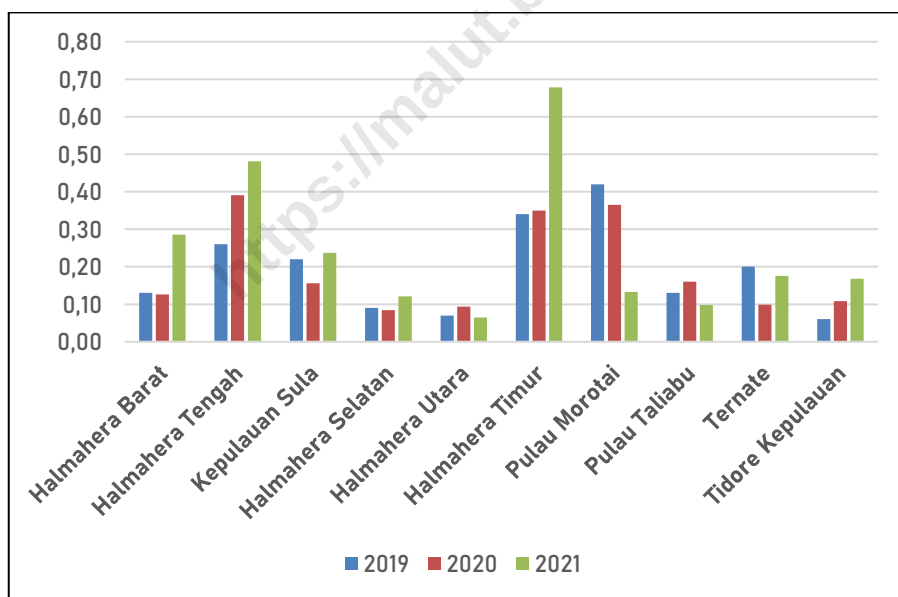


Pada Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara cenderung bergerak fluktuatif. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara meningkat sebesar 0,001 menjadi 0,207 dibandingkan tahun 2020 sebesar

0,206. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung semakin tinggi.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan perdesaan. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.5).

Gambar 4.8. Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021



Pada tingkat kabupaten/kota, indeks keparahan kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota cenderung bervariasi. Sebagian besar kabupaten mengalami kenaikan sementara beberapa kabupaten lainnya mengalami penurunan.

Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 0,68 sedangkan yang paling rendah adalah Pulau Taliabu , yaitu sebesar 0,10. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur lebih besar daripada di Kabupaten Pulau Taliabu karena distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur lebih beragam. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.6).

<https://malut.bps.go.id>

BAB 5

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN MALUKU UTARA



BAB V

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN

DI MALUKU UTARA

Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Di samping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Karakteristik rumah tangga miskin diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat. Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

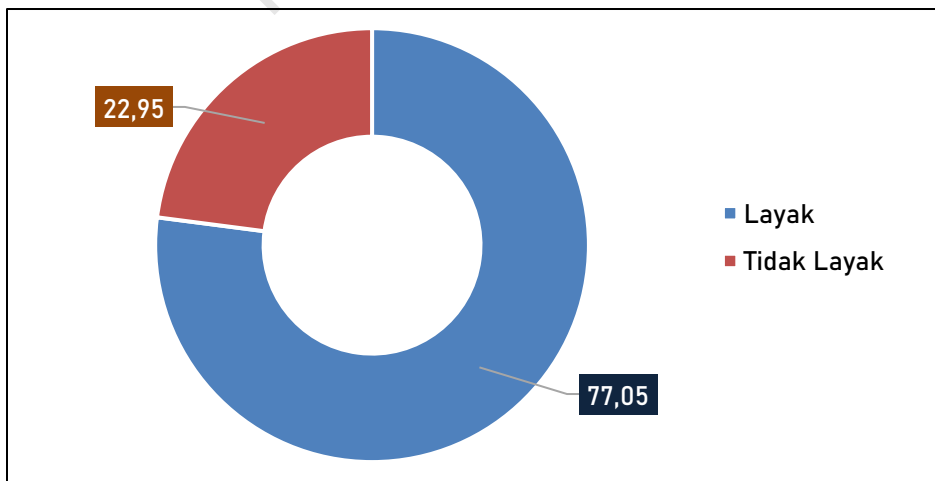
5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

5.1.1. Air Layak

Air yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Air layak pada umumnya digunakan pada aktivitas minum dan memasak setiap rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan air yang layak dapat mendukung keberlangsungan hidup setiap rumah tangga. Dalam publikasi ini air layak adalah air yang sumber utama air minum berasal dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Pada tahun 2021, penggunaan air layak oleh penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 77,05 persen. Sementara itu sebesar 22,95 persen penduduk miskin lainnya belum menggunakan air layak.

Gambar 5.1. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air layak di Maluku Utara Tahun 2021



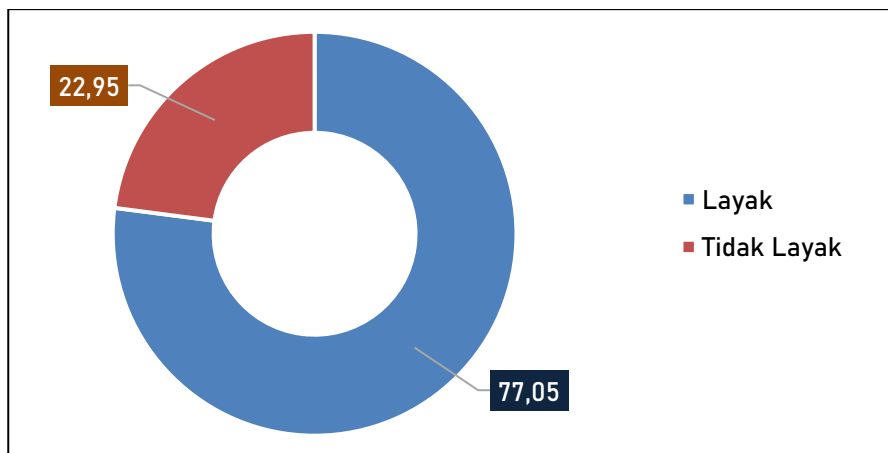
5.1.2. Jamban Sendiri/Bersama

Jamban merupakan salah satu sarana perumahan yang sedianya harus dimiliki oleh seluruh rumah tangga. Penggunaan jamban yang baik turut meningkatkan kesehatan setiap anggota rumah tangga. Sebaliknya penggunaan jamban yang tidak sesuai standar kesehatan akan berdampak buruk pada kesehatan anggota rumah tangga.

Penggunaan jamban di masyarakat terbagi menjadi jamban milik sendiri, jamban bersama yang digunakan secara terbatas oleh dua hingga empat rumah tangga saja, jamban umum yang diperuntukkan secara umum dan tidak memiliki jamban.

Penduduk miskin di Maluku Utara yang diketahui memiliki jamban sendiri/bersama pada tahun 2021 yaitu sebesar 62,34 persen. Sementara itu sebesar 37,66 persen penduduk menggunakan cara lainnya.

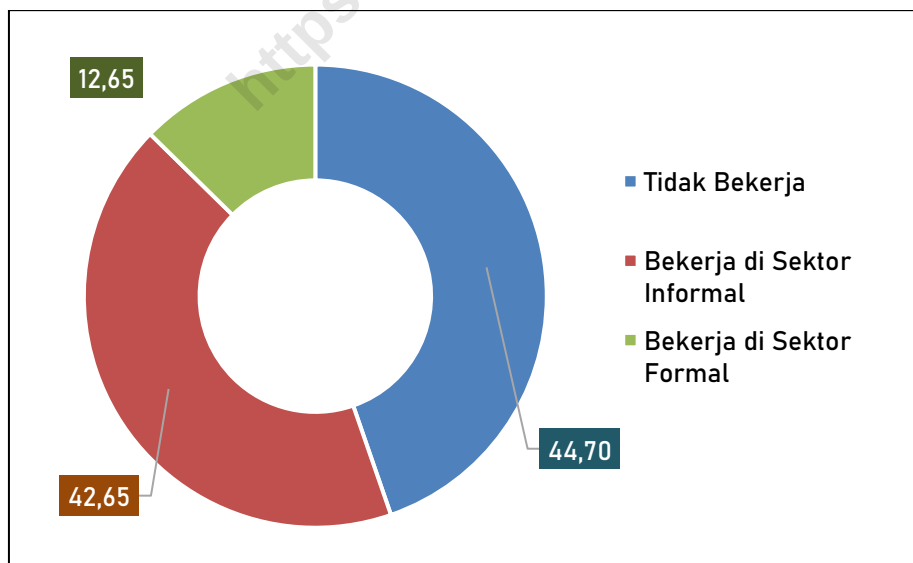
Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2021



5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan

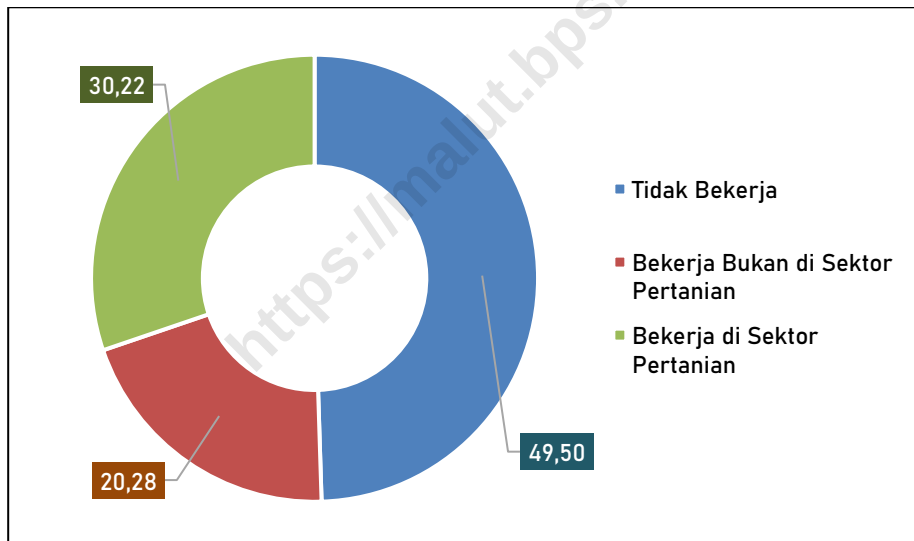
Status Bekerja menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat pada mereka yang tidak bekerja atau mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Selain itu penduduk miskin juga cenderung memiliki status bekerja informal, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/keluarga atau pekerja bebas.

Gambar 5.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Status Bekerja Tahun 2021



Pada Gambar 5.3. terlihat bahwa sebesar 49,50 persen penduduk miskin usia 15 Tahun ke atas di Maluku Utara tidak bekerja. Angka tersebut termasuk penduduk yang berstatus pengangguran dan bukan Angkatan kerja. Sementara itu sebesar 37,59 persen penduduk miskin di Maluku Utara bekerja pada sektor informal. Kemudian sebesar 12,91 persen penduduk miskin Maluku Utara bekerja pada sektor formal.

Gambar 5.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Sektor Bekerja Tahun 2021

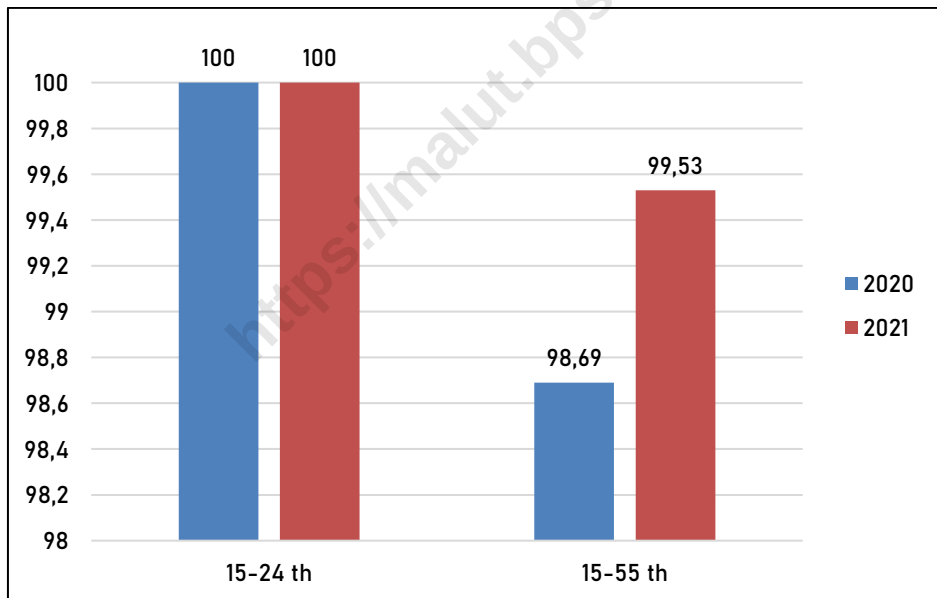


Kemudian berdasarkan Gambar 5.4, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Maluku Utara pada tahun 2021 yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 30,22 persen. Sementara itu penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian yaitu sebesar 20,28 persen. Data tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian atau tidak bekerja sama sekali.

5.3. Karakteristik Pendidikan

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting. Orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih kecil menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah angka melek huruf (AMH) dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

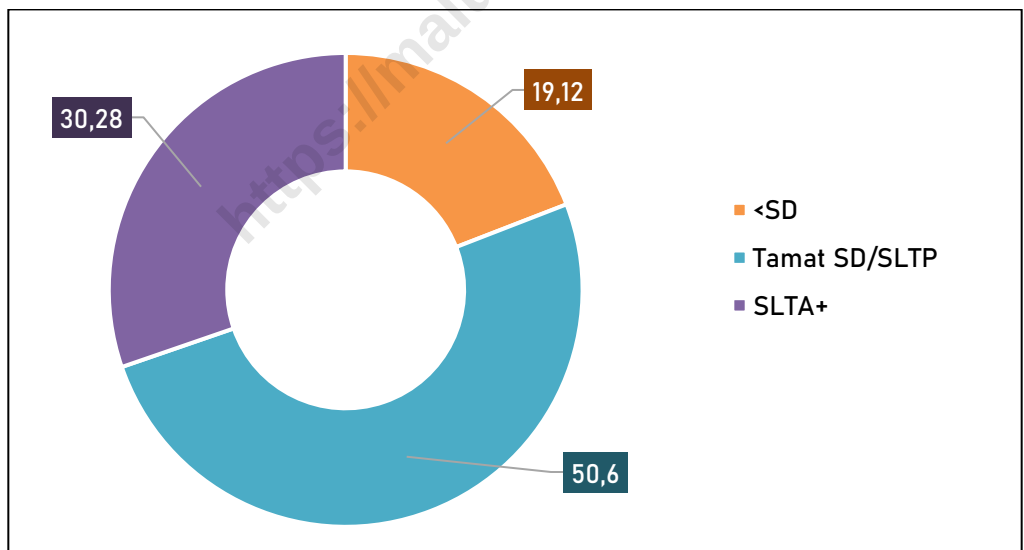
**Gambar 5.5. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Miskin
di Maluku Utara Tahun 2020 – 2021**



Angka melek huruf (AMH) penduduk miskin menggambarkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Pada publikasi ini AMH dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok usia 15-24 tahun dan usia 15-55 tahun.

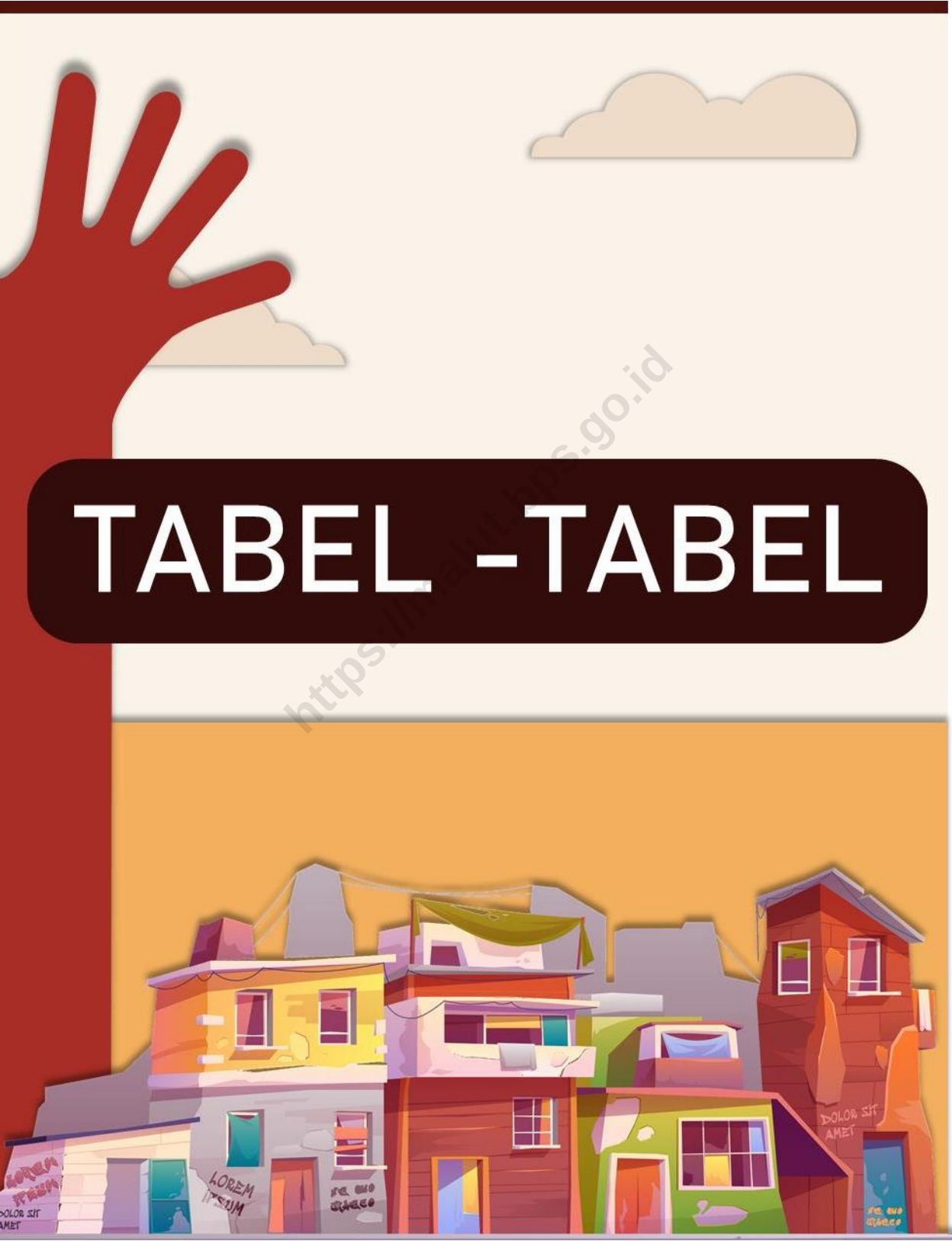
Dari Gambar 5.5. dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 AMH penduduk miskin untuk kelompok 15-24 tahun yaitu 100, artinya diyakini bahwa seluruh penduduk miskin usia 15-24 tahun di Maluku Utara dapat membaca dan menulis dengan kalimat sederhana. Sementara itu untuk kelompok usia 15-55 tahun, pada tahun 2021 AMH penduduk miskin Provinsi Maluku Utara yaitu sebesar 99,53. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 98,69. Artinya pada usia antara 25-55 tahun masih terdapat penduduk miskin yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana.

Gambar 5.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara Tahun 2021



Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan penduduk miskin adalah pendidikan dasar (SD atau SMP), yaitu sebesar 50,60 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA ke atas yang ditamatkannya sebesar 30,28 persen. Selain itu sebesar 19,12 persen penduduk miskin yang tidak menamatkan SD atau bahkan tidak pernah bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin memiliki karakteristik pendidikan yang kurang baik atau rendah

<https://malut.bps.go.id>

The background features a stylized illustration of a town with various colorful houses in shades of yellow, orange, red, and green. Some houses have windows and doors, and some have text like 'LOREM IPSUM' or 'DOLOR SIT AMET' on them. To the left of the town is a large, solid red shape that resembles a hand or a tree trunk. The sky is a light beige color with a few simple, rounded cloud shapes. A dark brown banner with the title 'TABEL -TABEL' is positioned across the middle of the image. A faint watermark 'http://s-ggo.id' is visible in the background.

TABEL -TABEL

Tabel L.1. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2019-2021

(dalam rupiah)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	324.849	339.283	358.707
Halmahera Tengah	454.180	466.973	491.657
Kepulauan Sula	359.497	372.561	391.912
Halmahera Selatan	310.161	324.767	343.323
Halmahera Utara	238.878	248.544	263.507
Halmahera Timur	545.238	569.464	600.339
Pulau Morotai	265.761	276.746	291.879
Pulau Taliabu	387.664	401.710	425.241
Ternate	578.185	595.553	629.463
Tidore Kepulauan	435.277	448.352	472.651

**Tabel L.2. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2019 – 2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	8,59	8,82	8,95
Halmahera Tengah	14,12	13,56	13,52
Kepulauan Sula	8,98	8,35	8,23
Halmahera Selatan	5,03	5,21	5,19
Halmahera Utara	4,55	4,45	5,22
Halmahera Timur	15,39	15,45	15,04
Pulau Morotai	7,27	6,46	6,52
Pulau Taliabu	7,53	7,30	7,49
Ternate	3,14	3,46	3,55
Tidore Kepulauan	6,10	6,52	6,58

**Tabel L.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi
Maluku Utara, Tahun 2016 – 2021**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	0,367	0,861	0,728
2017	0.667	0.861	0.808
2018	0,690	0,972	0,892
2019	0,531	1,031	0,887
2020	0,384	1,161	0,937
2021	0,969	0,970	0,970

Tabel L.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2019 – 2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,87	0,86	1,19
Halmahera Tengah	1,42	1,73	1,99
Kepulauan Sula	0,93	0,88	1,22
Halmahera Selatan	0,43	0,45	0,61
Halmahera Utara	0,38	0,38	0,48
Halmahera Timur	1,93	1,90	2,62
Pulau Morotai	1,50	1,05	0,72
Pulau Taliabu	0,82	0,89	0,57
Ternate	0,62	0,38	0,53
Tidore Kepulauan	0,40	0,60	0,82

**Tabel L.5.Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi
Maluku Utara,Tahun 2016 – 2021**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	0,064	0,128	0,177
2017	0,246	0,183	0,200
2018	0,187	0,194	0,192
2019	0,093	0,236	0,195
2020	0,061	0,264	0,206
2021	0,247	0,191	0,207

**Tabel L.6 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2019 – 2021**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,13	0,13	0,29
Halmahera Tengah	0,26	0,39	0,48
Kepulauan Sula	0,22	0,16	0,24
Halmahera Selatan	0,09	0,08	0,12
Halmahera Utara	0,07	0,09	0,07
Halmahera Timur	0,34	0,35	0,68
Pulau Morotai	0,42	0,37	0,13
Pulau Taliabu	0,13	0,16	0,10
Ternate	0,20	0,10	0,18
Tidore Kepulauan	0,06	0,11	0,17

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2021. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2021*. BPS: Jakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2021. *Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2021*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2021. *Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 039/07/82/Th.XIX*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2021. *Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 040/07/82/Th.XIX*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan Stadion No. 65 Ternate

Telp (0921) 3127878, Faks (0921) 3126301

Homepage : malut.bps.go.id email : bps8200@bps.go.id

ISSN 0264-5963



9 770264 596700